

Demokratisasi Media Penyiaran dan Eksistensi *Civil Society* Pascareformasi

Jamhur Poti

(Dosen Tetap pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH)

Abstract:

Democratization is an era of civilization demands progress, democratization has become an important agenda in the talks around the world. Democratization requires the freedom of the mass media. But the mass media especially the broadcast media consumed predominantly grown and developed into political power, economy and culture, with the freedom of the broadcast media has become an agent of change and modernization liberalisme capitalist culture. Democracy or not a country is not enough just to be seen of the political system, the media system changes are part of the democratization. born post-reform Law. 32 of 2003 on Broadcasting to the establishment of an independent state institution namely the Indonesian Broadcasting Commission (the independent regulatory body) the nature and functioning of civil society representasi represent the aspirations of the public interest will be broadcasting. KPIs can guarantee the existence of the community to get the information you deserve, reliable, kind and educate, create the broadcast media ownership with the principles of diversity and the diversity in content, deemed appropriate theoretical framework to describe the reality is pragmatic theory and transformation Universal Society by Jurgen Habermas (2001). Democratization of broadcasting media should promote democracy by stimulating the interests of the rights of citizens through smart supply information critical to ensure accountability of broadcast media. Principle accountabilities broadcast media was also prevents the public sphere is not merely changed into the market, when public space is equated with the market, then there would be no reliable public space, ideally the system broadcast media, broadcast media acts as a market place ideas, namely as a place where citizens aspirations so that they can distribute ideas and ideas through the broadcast media. intelligent and dignified. namely as a place where citizens aspirations so that they can channel the ideas and notions through broadcast media. The question is the extent of the barriers and the existence of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) through broadcast media to build a healthy, intelligent and dignified..

Keywords: *Democratization broadcast media and civil society*

Pendahuluan

Demokratisasi telah mengalami perkembangan sejak definisi empirik Schumpeter dikemukakan, perdebatan akademis seputar demokratisasi melahirkan definisi konsep paling beragam dalam ranah akademis. Berbagai studi mengenai demokratisasi dalam ilmu politik dan sosiologi cenderung untuk menilainya dari sudut pandang berbeda-beda.

Demokratisasi tidak memiliki tolok ukur pasti dalam pengukurannya karena membutuhkan konsensus baik dalam lingkup publik maupun akademik sekalipun. (Mayo, 2000; Horowitz, 2006) menyatakan bahwa demokratisasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan berdasarkan atas kebersamaan oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat

dalam pemilihan-pemilihan periodik yang didasarkan atas prinsip kesetaraan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik, dan kebebasan menyampaikan informasi, hak-hak individu dan hak untuk berekspresi.

Demokratisasi dalam definisi Islam juga memiliki wawasan yang mirip jika di pahami secara substansif, yaitu kedaulatan ditangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat, Islam merupakan sistem politik yang demokratis, dan demokrasi adalah sejalan dengan konsep Islam. Pandangan ini mendapat dukungan dari banyak cendekiawan muslim, diantaranya Yusuf Al-Qardhawy, bahwa ia berpendapat bahwa substansif demokrasi sesungguhnya berasal dari ajaran Islam.

Jika ditinjau proses demokratisasi di Indonesia saat ini, sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Tidaklah berlebihan apa yang diucapkan mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim (2010), menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Sependapat dengan ikhwal tersebut hasil survei dari *Freedom House* (2008), juga menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar didunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi, yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan raya secara langsung dengan memakai sistem "*one man one vote*". Demokratisasi, menurut Ibrahim, adalah pemberian hak kebebasan dari negara (*state*) kepada warganegara (*civil*).

Meskipun pendemokrasian Indonesia pascareformasi tahun 1998 mengalami perkembangan yang sangat signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya, bahkan menjadi kiblat pendemokrasian di ASEAN, namun belumlah dapat memberikan suatu perubahan bagi kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat Indonesia, walaupun ada prinsip-prinsip demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan seperti pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat, pemilihan kepala negara atau presiden secara

langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia, kebebasan untuk mendapat dan menyampaikan informasi dapat dilihat dengan tumbuh dan berkembangnya media massa khususnya media penyiaran begitu juga dengan media cetak maupun media massa lainnya merupakan salah satu indikator bagian adanya demokratisasi (McChesney, 2000; Hendry, 2011).

Kemajuan tersebut tidak hanya tertumpu pada pertumbuhan media penyiaran saja, akan tetapi perubahan dalam regulasi juga mendapat perhatian yang utama, yang mana sebelumnya kewenangan negara (*state*) terhadap media penyiaran begitu sangat dominan sekali akan tetapi setelah reformasi tahun 1998 serta kuatnya tuntutan masyarakat agar kewenangan tersebut melibatkan adanya partisipasi *civil society* di dalamnya, maka lahirlah UU No. 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran yang mengamanatkan dibentuknya suatu lembaga negara yang independen, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (*independent regulatory body*) sebagai wujud dari peran serta dan representasi masyarakat sivil (*civil society*) berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Adapun Anggota KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dengan anggota berjumlah 9 (sembilan) orang, dan Komisi Penyiaran Daerah (KPD) dibentuk di tingkat daerah dengan anggota berjumlah 7 (tujuh) orang.

Suksesnya transisi demokrasi Indonesia dapat dijangka adalah pada gerakan (*civil society*) untuk mengurangi polarisasi politik dan menciptakan kultur keberagaman dan toleransi, transaksi demokrasi selalu dimulai dengan jatuhnya pemerintah yang otoriter, sedangkan waktu dan lamanya transisi tergantung pada kemampuan rejim demokrasi baru untuk mengatasi problem tradisional yang menghadang, salah satu permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh negara-negara yang sedang mengalami transisi menuju demokrasi adalah ketidak-mampuan membentuk tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), yaitu sistem pengelolaan pemerintahan yang transparan

dan akuntabel, akibatnya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat akan berkurang, sehingga legitimasi demokarsi akan menjadi lemah, tanpa legitimasi yang kuat rejim demokrasi baru akan kehilangan ruh dan daya tariknya.

Seperti yang dinyatakan oleh Inglehart and Welzel (2005: 96), "bahwa dalam jangka panjang demokrasi tidak hanya didasari pada perubahan intitusi atau perilaku para elit dan kepentingan semata, melainkan keberlangsungannya akan sangat tergantung pada nilai dan kepercayaan dari masyarakat awam (*public-trust*) di wilayahnya". Untuk mewujudkan suatu demokrasi bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan tahapan-tahapan yang tidak dapat digeneralisasi dan dipaksakan secara instan karena demokrasi memerlukan suatu proses dari rejim yang lama berkuasa kepada rezim yang baru berkuasa.

Sejarah Pendemokratisasian

Mengkaji dari beberapa literatur sejarah tentang pendemokratisasian bahwa pendemokratisasian bagaimanapun merupakan fenomena dan isu yang sedang bergulir disemua negara dan menarik untuk disimak, meskipun dalam sejarah pendemokratisasian sudah lama berlangsung sejak diawali dengan terjadinya revolusi Perancis dan Amerika, proses demokrasisasi yang terjadi pada abad ke-18 dianggap para teoritis sebagai gelombang demokrasi. Setelah perang dunia II. Sejarah dan perkembangan demokrasisasi digambarkan dalam 7 (tujuh) gelombang peradaban manusia yang berkaitan dengan sejumlah indikator yang ditetapkan oleh (Tehrani 1990; Rahmattie, 2007) sebagai berikut:

Pada tahap pendemokrasian I, pendemokratisasian diarahkan dan perhatiannya terhadap sistem ekonomi, politik, teknologi, ideologi, institusi-institusi komunikasi dan elit-elit modernisasi, ide dan gagasan mengenai demokrasi dalam kontek kebebasan sudah mulai dikembangkan sejak dari tahun 8000 sebelum masehi sampai tahun 1492 masehi, dalam tempo waktu yang panjang tersebut agama-agama seperti Budha, Kristian dan Islam sangat memberikan perhatian, pengaruh dan kontribusi terhadap ide-ide dan gagasan mengenai konsep-konsep demokrasi.

Pendemokrasian II, berlangsung di Eropa Barat pada abad ke-16, ketika terjadi perpindahan besar-besaran para muslim dari Granada ke Spanyol serta Colombus menakluki benua Amerika pada tempoh yang sama. Ketika itu berlaku era reformasi dan *renaissance* yang ditandai adanya pertentangan terhadap gereja Katolik dan berkembang menjadi perang agama. Pengaruh-pengaruh reformasi dan *renaissance* yang digabungkan menjadi tiga hal, yaitu; privatisasi, nasionalisasi dan sekuralisasi. Sebagai implementasinya, tanggung jawab individual dan kebebasan memeluk kepercayaan berlaku menerusi proses individualisasi yang meliputi pemoderninsasi. Perbedaan kepentingan pribadi dan masyarakat juga merupakan akibat dari pengakuan yang berlebihan terhadap hak-hak individu (*privatisasi*).

Demokratisasi III, melalui superioritas teknologi dan kecakapan organisasi di kota-kota baru, digunakan oleh media massa untuk menguasai modal yang berjalan beriringan dengan bangkitnya sistem teritorial dari negara bangsa. Semangat aliran yang diajarkan oleh Max Weber (1958) dijadikan sebagai semangat yang menjelma menjadi spirit "Kapitalisme" yang berarti semangat untuk kerja keras, hemat, sederhana dan investasi. Amerika menjadi negara pertama yang menunjukkan melalui perlembagaan tertulis bahwa suatu negara dapat direalisasikan melalui ide-ide penyatuan terhadap demokrasi dibandingkan dengan pertumpahan darah dan sengketa. Pada tahun 1990 bubarnya Soviet Union dan jatuhnya rejim komunis di Eropah Timur. Penyebaran demokrasi dimulai dan perubahan dramatik dalam politik global ditandai dengan semakin banyak negara yang menginginkan dan mencita-citakan demokrasi sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang terbaik. (Schuck, 2010: 11-15).

Demokratisasi IV, dari tahun 1800-1899 (abad ke-19) kerajaan industri telah muncul sebagai modernisasi tahap keempat. Menurut Hobson (1902) dan Lenin (1917) dalam Tehrani (1990 : 21), bahwa imperialisme baru secara material berbeda dengan kerajaan masa lampau, yaitu imperialisme yang terbentuk berdasarkan permintaan penguasa kapitalis yang baru. Dimana hal ini dikendalikan dengan maksud

pencarian sumber-sumber bahan mentah yang baru, buruh-buruh yang lebih murah dan pasaran pengguna. Bendera negara industri maju mengikuti peta perdagangan keberbagai belahan dunia, sebagai eksploitasi kaum kapitalis. Penaklukan militer digunakan sebagai perlindungan terakhir untuk membuka wilayah baru.

Demokratisasi V, modernisasi tahap kelima ditandai dengan meningkatnya globalisasi di akhir perang dunia kedua sejak tahun 1945, revolusi manajerial dalam konteks globalisasi terutama antara kapitalisme-komunisme-nasionalisme. Pada tataran politik muncul sistem bipolar dunia yaitu demokratisasi menuju revolusi liberalisasi dan nasional. Dua faktor utama yang mewarnai era ini pertama runtuhnya kerajaan-kerajaan di Eropa dan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dasar penentuan nasib sendiri, disisi lain Amerika mencari keseimbangan yang baik untuk memimpin dunia menuju prinsip globalisasi. Sistem kapitalis global diwujudkan dengan mendirikan Bank Dunia Dana Keuangan Internasional (IMF) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) untuk mengatur aliran modal, mata uang dan aturan tarif dan non tarif. Namun di sisi lain, perusahaan transnasional menyusun strategi global, demi menjamin pengaturan sentralisasi bisnis mereka yang diperkuat oleh jangkauan periklanan global dan budaya konsumsi massa yang sama kuatnya dengan ekspansi "militer bersenjata".

Media massa yang besar seperti *Brithist Broadcast Council* (BBC), *Central News Network* (CNN) telah melayani sarana ideologi pada dunia kesatu juga keseimbangan dunia kedua yang telah memiliki radio Moskow, radio Beijing. Namun terlihat bahwa perbedaan elit komunikasi yang baru secara jelas telah mengatur struktur teknologi yang sangat besar bagi komunikasi global. Elit komunikasi baru dengan menguasai teknologi, menyatukan suara, data dan pikiran dalam jaringan terpadu *Integrated Sistem Digital Network* (ISDN), sehingga mengaburkan batas di antara teknologi media, institusi dan profesi. Di dunia ketiga, tingkat pembangunan teknologi komunikasi mengalami keterbelakangan, namun elit komunikasi telah menjadikan

intelektual dan ideologi yang diasosiasikan dengan percetakan dan media penyiaran, merupakan institusi dalam situasi yang muncul di kalangan perguruan tinggi, media massa dan partai politik. Elit komunikasi berbicara dalam bahasa sederhana tentang agama penduduk asli, suku bangsa dan pembicaraan nasionalis. Kombinasi gerakan masyarakat, media kecil, radio transistor memberikan kekuatan baru pada elit komunikasi untuk menantang kekuasaan pada pemerintah dan media massa yang besar dan mapan.

Demokratisasi VI, dimulai tahun 1989 saat diadakannya pertemuan Presiden Bush dan Gorbachev di Malta untuk mengakhiri perang dingin. Dunia menyaksikan keseimbangan yang mengkhawatirkan kedua super power yang masing-masing memiliki senjata pemusnah massal untuk menghancurkan peradaban manusia. Revolusi yang terjadi di bidang informasi terutama antara kapitalisme dan teknokrat. Sistem politik multipolar dunia, dan demokratisasi keenam ditandai dengan adanya lokalisasi, etnik, keagamaan, pemberontakan kaum feminis. Dengan hancurnya Uni Sovyet dan China dalam pusaran kapitalisme dunia, versi globalisasi dan kapitalisme berkembang dengan 'warna' baru.

Demokratisasi VII, periode masa yang akan datang ini ditandai dengan 'hyperspace' tempat, ruang pada waktu itu akan terkuasai dan dimengerti. Kemudian manusia robot akan menjadi sangat penting bagi suatu sistem produksi, distribusi dan informasi. Demokratisasi merupakan ide yang kompleks untuk dipertimbangkan sebagai agenda perundingan. Demokrasi akan berkaitan dengan konteks dan keaktualannya, khususnya dalam lingkup nasional dan tradisi budaya. Persaingan bisa diinterpretasikan berkaitan dengan keamanan, keadilan atau persamaan.

Teori Komunikasi Habermas

Dalam mengkaji pendemokrasian media massa, asas kerangka teoritikal yang dianggap tepat untuk menggambarkan realiti tersebut adalah teori pragmatik Universal dan Transformasi Masyarakat oleh Jurgen Habermas (1980). Habermas meyakini bahwa sebuah masyarakat demokratik, bebas dari dominasi

yang tidak perlu dari kepentingan apapun dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Lingkup publik yang kuat terpisah dari kepentingan-kepentingan pribadi, diperlukan komunikasi yang bebas dan inten untuk mencapai keadaan yang diinginkan bersama. Idealnya publik dan swasta harus seimbang dan sektor publik harus cukup kuat untuk memberikan suatu iklim secara bebas mengekspresikan gagasan-gagasan dan perdebatan. Habermas menilai komunikasi sebagai suatu yang penting dan utama bagi pembebasan, karena bahasa merupakan alat untuk memenuhi kepentingan pembebasan tersebut. Oleh karena ini, kompetensi komunikasi diperlukan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan. Kompetensi meliputi : pengetahuan, bagaimana menggunakan pembicaraan dengan benar untuk mencapai sasaran dan ini menuntut keberanian yang mesti dilakukan.

Habermas menguraikan 3 (tiga) jenis "tindakan pembicaraan" yaitu:

1. *Constantive*: Pernyataan dirancang untuk menyatakan sebuah proposisi sebagai kebenaran (kesahihan pernyataan kebenaran).
2. *Regulative*: Dirancang sebagai aturan yang membuat perundingan berjalan dalam mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain atau kelompok lain, berdasarkan kesahihan dan tidak diluar topik dan tujuan dari pembicaraan tersebut.
3. *Avowal*: Pengakuan dirancang untuk mengungkapkan keadaan *internal audience* untuk mengakui sesuatu tentang seseorang (kesahihan tulus dan jujur).

Habermas meyakini bahwa kebebasan berbicara, berkomunikasi diperlukan untuk menciptakan interaksi dan normal yang produktif dan memungkinkan terjadinya tahap-tahap wacana (penghujahan yang sistematis yang menggunakan daya tarik khusus untuk membuktikan kesahihan pernyataan) yang lebih tinggi. Situasi pembicaraan dalam masyarakat menurut Habermas harus dimodelkan sebagai berikut:

1. Situasi pembicaraan yang ideal menurut kebebasan berbicara, tidak boleh ada kekang-

an terhadap apa yang bisa diungkapkan.

2. Semua individu harus memiliki akses yang sama untuk berbicara, dengan kata lain semua pembicaraan mestilah memiliki kesetaraan dialami secara absah.
3. Etika dan norma-norma ditengah masyarakat dalam kebebasan berbicara bukan diperuntukan bagi seseorang individu atau kepada sepihak saja melainkan etika dan nilai kesopanan itu mestilah ditegakkan dan berlakusama bagi semua kalangan dalam masyarakat.

Media Penyiaran Televisi

Perkembangan media massa Indonesia pasca reformasi tahun 1998 mengalami kemajuan yang pesat, tumbuh dan berkembang terutama media penyiaran televisi. Bahwa saat ini televisi menjadi media penyiaran yang paling populer dan diminati di Indonesia, mulai dari masyarakat status sosial bawah, status sosial menengah sampai yang status sosialnya atas memiliki media elektronik ini. Kepopuleran media penyiaran televisi ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya pertumbuhan televisi yang dapat diterima baik secara langsung (*free-to-air*) maupun juga dengan saluran televisi berbayar (*pay-tv*), yaitu: RCTI, SCTV, Trans 7, Trans TV, Metro TV, TV One, Indosiar, ANTV, MNC TV, Global TV dan TVRI. Sedangkan saluran televisi berbayar, yaitu; Indovision, Telkom Vision, Sky Nindo, Orange TV. Selain itu luberan (*spill over*) siaran televisi dari negara Malaysia seperti; TV1, TV2, TV3, TV12, dan dari negara Singapura, yaitu: Media Corp5, Suria TV, dan dari negara lainnya dengan berbagai saluran dan program lainnya turut memberikan pilihan terhadap tontonan tayangan televisi dinegara ini terutama didaerah kepulauan dan perbatasan. Tayangan yang disuguhi oleh media penyiaran televisi sekarang ini seakan-akan telah menjadi suatu keharusan untuk ditonton dan dikonsumsi, bukan lagi merupakan suatu kebutuhan bagi kalangan pemirsawannya sebagai media yang memberikan pengetahuan, ini disebabkan oleh sifatnya multi dimensi yang ada pada media penyiaran televisi tersebut, apalagi bagi dalam kalangan remaja menghabiskan waktunya berjam-jam untuk menonton tayangan televisi, mereka lebih

tertarik untuk menonton tayangan televisi karena sifat hiburanannya. Sehingga menonton tayangan televisi sudah menjadi suatu budaya dalam kalangan remaja saat ini. Sebuah studi yang dilakukan oleh Hendriyani, Hollander,

d'Haenens dan Beentjes, (2012), terhadap 589 anak kelas 4 dan 5 Sekolah Dasar di 5 wilayah Jakarta. Setiap wilayah dipilih secara random 2 sekolah dasar (1 Sekolah Dasar Negeri dan 1 Sekolah Dasar Swasta).

Tabel 1. Media Massa yang Digunakan

No	Media yang Digunakan	Perentase
1	Televisi	98 %
2	<i>Mobile phone</i>	90 %
3	Buku (bukan buku sekolah)	87 %
4	Video Player (VCD/DVD)	80 %
5	Radio	74 %
6	Majalah	74 %
7	<i>Game Player</i>	58 %
8	Internet	28 %

Sumber: Hendriyani, Hollander, d'Haenens, & Beentjes (2012)

Sementara itu dilihat dari lamanya waktu yang dihabiskan anak-anak untuk menonton tayangan televisi dalam 1 minggu, waktu anak-anak menonton tayangan televisi sekitar 170 jam, banyak sekali yang mereka pelajari dari hal tersebut. Satu diantaranya mereka belajar budaya kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Pengaruh media penyiaran televisi terhadap anak makin besar, teknologi semakin canggih dan intensitasnya semakin tinggi, padahal orangtua tidak punya waktu yang cukup untuk memerhatikan, mendampingi dan mengawasi anak. Anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton tayangan televisi daripada melakukan hal lainnya. Dalam seminggu anak-anak menonton tayangan televisi sekitar 170 jam. Apa yang mereka pelajari selama itu ?. Mereka akan belajar bahwa kekerasan itu dapat menyelesaikan masalah. Mereka juga belajar untuk duduk dirumah dan menonton, bukannya bermain diluar dan berolahraga. Hal ini menjauhkan mereka dari pelajaran-pelajaran hidup yang penting, seperti bagaimana cara berinteraksi dengan teman sebaya, belajar cara berkompromi dan berbagi di dunia yang penuh dengan orang lain serta lingkungan. Anak merupakan kelompok pemirsa yang

paling rawan terhadap dampak negatif tayangan siaran-siaran televisi.

Data tahun 2002 mengenai jumlah jam menonton tayangan televisi pada anak di Indonesia adalah sekitar 30-35 jam/minggu atau 1560-1820 jam/ tahun. Angka ini jauh lebih besar dibanding jam belajar di sekolah dasar yang tidak sampai 1000 jam/tahun. Tidak semua acara tayangan televisi aman untuk anak. Bahkan, "Kidia" mencatat bahwa pada 2004 acara untuk anak yang aman hanya sekitar 15% saja. Oleh karena itu harus betul-betul diseleksi. Saat ini jumlah acara yang ditayangkan ditelvisi untuk anak usia prasekolah dan sekolah dasar perminggu sekitar 80 judul ditayangkan dalam 300 kali penayangan selama 170 jam, padahal dalam seminggu ada 24 jam x 7 = 168 jam. Jadi, selain sudah sangat berlebihan, acara untuk anak juga banyak yang tidak aman. Tayangan acara televisi bisa dikelompokkan dalam 3 kategori: Aman, Hati-hati, dan Tidak Aman untuk anak. Acara yang 'Aman': tidak banyak mengandung adegan kekerasan, seks, dan mistis. Acara ini aman karena kekuatan ceritanya yang sederhana dan mudah dipahami. Anak-anak boleh menonton tanpa didampingi. Acara yang 'Hati-hati': isi acara mengandung kekerasan, seks dan mistis

namun tidak berlebihan. Tema cerita dan jalan cerita mungkin agak kurang cocok untuk anak usia sekolah dasar sehingga harus didampingi ketika menonton. Acara yang "Tidak Aman" isi acara banyak mengandung adegan kekerasan, seks, pronografi dan mistis yang

berlebihan dan terbuka, daya tarik yang utama ada pada adegan-adegan tersebut sebaiknya anak-anak tidak menonton acara ini. Tayangan-tayangan seperti ini dapat merusak (benalitas) pada pikiran dan perilaku terhadap anak-anak dan remaja

Tabel 2. Rata-rata Jumlah Hari Menonton Televisi Perminggu

No	Jumlah Hari	Persentase
1	7	64,10
2	6	3,50
3	5	7,40
4	4	3,70
5	3	5,20
6	2	2,20
7	1	1,90
8	0	11,90
Jumlah		100 %

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia (2011)

Melihat tingginya tingkat ketergantungan masyarakat khususnya anak-anak dan remaja untuk menonton siaran televisi, dalam hal ini diperlu peran *civil society* dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengedukasi melalui literasi media agar masyarakat memiliki pengetahuan terhadap pengaruh negatif dari tayangan televisi dan seberapa butuhnya untuk menonton tayangan siaran televisi tersebut, agar generasi penerus bangsa tidak dirusak oleh tayangan-tayangan negatif yang tidak ramah terhadap anak, karena media penyiaran memiliki tanggung-jawab dan fungsi dalam hal membentuk karakter anak bangsa yang berkualitas, cerdas dan berahlak mulia.

Media massa, terutama penyiaran televisi yang sangat diminati sebagai ruang publik hendaknya dapat membantu menyeleksi dan memberikan informasi yang bermakna agar informasi yang disampaikan tidak hanya sekadar menjadi komoditi tetapi memiliki nilai dan etika, budaya dan pengetahuan. Media penyiaran televisi hendaknya memiliki persamaan terhadap kebutuhan secara profesional baik kepada masyarakat maupun kepada pengguna dan lingkungan dalam menyajikan program-program siarannya.

Jika mengacu pada pendapat Jurgen Habermas menyatakan media penyiaran sesungguhnya adalah sebuah *public sphere* yang semestinya dijaga dari berbagai pengaruh dan kepentingan. Dalam artian mediapenyiaran selayaknya menjadi *The Market Places Of Ideas* tempat penawaran berbagai gagasan sebagaimana setiap konsep pasar, yang mana hanya ide terbaik sajalah yang pantas dijual dan ditawarkan. Salah satu bentuk konglomerasi media penyiaran saat ini adalah terpusatnya kepemilikan media penyiaran oleh para penguasa modal. Fenomena itu dinilai berimplikasi terhadap obyektivitas media penyiaran dalam menyampaikan muatan-muatannya. Konglomerasi media penyiaran menjadikan orientasi cenderung ke arah industrialisasi, bukan fungsi jurnalismenya. Akibatnya, media penyiaran lebih mengutamakan tayangan informasi-informasi yang menarik saja ketimbang yang penting seperti edukasi dan pengetahuan. Konglomerasi (*conglomerate*) media penyiaran sudah tidak dapat dinafikan lagi, secara terang-terangan pemilik modal besar tersebut sudah mulai menguasai usaha industri media penyiaran yang merupakan bisnis baru dan sebagai pencetak uang (Schuck, 2010).

Munculnya konglomerasi media massa dalam bentuk satu perusahaan besar menaungi beberapa media massa sekaligus seperti contoh group Media Nusantara Cipta (MNC), memiliki tiga stasiun televisi nasional, Rajawali Citra Indonesia (RCTI), GlobalTV, MNCTV, Indovision (*pay-tv*), media cetak Seputar Indonesia, dan Jaringan Radio di berbagai daerah di Indonesia. Belum lagi stasiun televisi lokal yang berjaringan dengan grup ini. Di media cetak grup Jawa Pos dan Grup Kompas Gramedia menguasai pangsa pasar terbesar media cetak di Indonesia. munculnya Trans Corp, dengan Trans TV dan Trans 7, Bakrie Group yang memulai bisnis media, Andalas Television (ANTV) dan TV One. Metro TV dan Media Indonesia yang dimiliki Surya Paloh. Buah dari hasil reformasi tahun 1998 lahirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang media penyiaran ini merupakan momentum historis, berubahnya sistem dan regulasi penyiaran di Indonesia yang menganut sistem dan prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan prinsip keberagaman dalam kandungan (*diversity of content*) diperkenalkan dan diperbolehkan.

Prinsip keberagaman kandungan memastikan dan menjamin tersedianya informasi yang beranekaragam, baik jenis maupun kandungannya, sedangkan prinsip keberagaman dalam kepemilikan memastikan bahwa media penyiaran di Indonesia tidak lagi dikuasai atau dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok sehingga monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat bisa dicegah. Melalui reformasi tersebut demokrasi media penyiaran bisa kembali lagi ketangan publik atau berubah dari *state-based power* (kekuasaan negara) menjadi *public-based-power* (kekuasaan publik).

Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat madani merupakan suatu terjemahan dari *civil society* yang merupakan konsep yang melihat adanya hubungan sedemikian rupa antara masyarakat dan Negara. Pandangan tentang hubungan antara masyarakat dan Negara mengalami evolusi dari masa ke masa. Terakhir berkembang pemikiran bahwa ada tiga pilar kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia yaitu:

negara (*state*), pasar (*market*), dan *civil society*. Masyarakat madani (*civil-society*) dikonsepsikan dalam hal ini merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar.

Masyarakat madani selalu menjadi tipe masyarakat yang didambakan oleh banyak orang, bahkan oleh masyarakat di dunia. Tipe masyarakat ini adalah gambaran masyarakat yang diidealkan oleh Islam dan pernah menjadi bagian dari sejarah Rasulullah saw ketika beliau memimpin negara Islam pertama di Madinah. Adanya istilah masyarakat madani pada prinsipnya bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad Saw. beserta para pengikutnya dari Makah ke Yatsrib. Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sebuah sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk yang madaniyyah (beradab), setelah Rasulullah mempelajari karakteristik dan struktur masyarakat di Madinah yang cukup beragam, beliau kemudian melakukan beberapa perubahan sosial.

Konsep "masyarakat madani" merupakan penerjemahan atau pengislaman dari konsep "civil society". Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan *civil society* sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis ketidakbersalahan pembentukan *civil society* dalam masyarakat muslim modern. Pada masa-masa sekarang ini, makna masyarakat lebih mengarah kepada masyarakat sipil atau terjemahan dari *civil society*. Konsep *civil society* lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat.

Cornelis Lay melihat substansi *civil society* mengacu kepada pluralitas bentuk dari kelompok-kelompok independen (asosiasi, lembaga kolektivitas, perwakilan kepentingan) dan sekaligus sebagai raut-raut dari pendapat umum dan komunikasi yang independen. *Civil society* adalah agen, sekaligus hasil dari transformasi sosial (Lay, 2004). Sementara menurut Haynes, tekanan dari "civil society" sering memaksa pemerintah untuk meng-

umumkan program-program demokrasi, menyatakan agenda reformasi politik, merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum multipartai, yang demi kejujuran diawasi oleh tim pengamat internasional (Haynes, 2000).

Masyarakat madani (*civil society*) disini dipandang memiliki peran sebagai tempat untuk menyeimbangkan (*imparasials*) kepentingan dan kebutuhan yang seharusnya tidak dilakukan oleh negara. Namun kritik terhadap pandangan ini karena masih kurangnya atensi terhadap kebutuhan didalam ruang publik itu sendiri belum terjawab (Calabrese, 2004: 319). KPI yang merupakan wujud dari konsep masyarakat madani (*civil society*) yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu penagaturan infrastruksur bidang penyiaran.
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lebaga penyiaran dan industri terkait.
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Selain dari pada itu KPI diharapkan dapat menargetkan dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan mendorong bagi lembaga penyiaran yang berada didaerah kepulauan dan perbatasan untuk meningkatkan kualitas perangkat dan berbagai infrastruktur sehingga lembaga penyiaran nasional dapat bersaing dengan dengan lembaga penyiaran asing yang mana terjadi perluberan siaran (*spillover*) ke daerah-daerah *blank spot area* diwilayah Indonesia. Eksistensi KPI sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat berjalan dengan maksimal dalam mewujudkan demokratisasi penyiaran, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip amanat undang-

undang tentang penyiaran dan konsep *civil society* yaitu; adanya keberagaman dalam kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman dari isi kandungan siaran (*diversity of content*), yang menghapus hegemoni negara dan hegemoni industri penyiaran. Sebagai tuntutan deregulasi media penyiaran pada hakekatnya adalah penghapusan semaksimal mungkin *state regulation*, campur tangan pemerintah sedapat mungkin dikurangi (*invisible hand*) yang merupakan pencerminan dari sebuah negara demokrasi dalam menciptakan kesempatan yang sama bagi individu untuk berkembang yang berujung pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Penutup

Demokratisasi media penyiaran selalu dikaitkan dengan bagaimana untuk merealisasikan dan mewujudkan kebebasan hak-hak masyarakat fundamental akan akses informasi yang baik dan benar, setelah reformasi tahun 1998 bergulir perkembangan media penyiaran tumbuh dan berkembang dengan cepat, media penyiaran tumbuh sebagai kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan budaya, media seakan-akan tidak lagi sebagai *the four estate of democracy*, media penyiaran malah menjadi suatu industri yang dijadikan sebagai *capital oriented* demokrasi tidaknya suatu negara tidak cukup hanya dilihat dari sistem politiknya saja. Menurut Henry (2011) pentingnya perubahan sistem media penyiaran bagian dari demokratisasi. Untuk mendemokratisasikan masyarakat harus pula diikuti adanya upaya-upaya untuk meruk sistem media penyiaran.

Demokratisasi penyiaran sebagaimana termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran didesain untuk melahirkan sebuah lembaga negara yang independen yaitu KPI sebagai wujud dari keterwakilan *civil society* dalam media penyiaran untuk melakukan dan mempertahankan prinsip-prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman dalam isi kandung (*diversity of content*). Eksistensi KPI dapat menjamin masyarakat mendapatkan informasi

yang layak, terpercaya, baik dan mendidik, menciptakan "media penyiaran yang bebas" energentik produk reformasi yang memungkinkan "bebas" ide dan gagasan politik. Demokratisasi media penyiaran semestinya mendorong demokrasi dengan menstimulasi kepentingan hak-hak warga melalui suplai informasi yang cerdas dan kritis untuk menjaga akuntabilitas media penyiaran. Prinsip akuntabilitas media penyiaran itu juga mencegah agar ruang publik tersebut tidak diubah melulu menjadi pasar (*market*), bila

ruang publik disamakan dengan pasar, maka tidak akan ada ruang publik yang terpercaya. Idealnya dalam sistem media penyiaran, media penyiaran berperan sebagai *market place ideas*, yaitu sebagai wadah tempat penyaluran aspirasi warganegara sehingga mereka dapat menyalurkan idea dan gagasan melalui media penyiaran. Pertanyaannya sejauhmana hambatan dan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membangun Indonesia melalui media penyiaran yang sehat, cerdas dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Nadiah. 2009. "Badan Regulator Penyiaran dalam Perspektif Hubungan antara Negara, Pasar dan Masyarakat Madani: Sebuah Studi Kasus terhadap Sejarah Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Pendukung Demokrasi Ranah Publik". <http://www.novapdf.com>.
- Ausop, Asep Zaenal. 2009. "Demokrasi dan Musyawarah Dalam Pandangan Darul Arqam, NII, Hizbut Tahrir Indonesia". *Jurnal Sositoknologi* 17(8).
- Calabrese, Andrew. 2004. "The Promise of Civil Society: a Global Movement for Communication Rights". *Carfax Publishing* 18(3): 317-329.
- Golding, Peter and Graham Murdoch. 1991. "Culture, Communications and Political Economy", in James Curran and Michael Gurevitch, *Mass Media And Society (Third Edition)* London: Oxford University Press.
- Habermas, Jurgen. 2001. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press.
- Harowitz, Donald. 2001. "The Draft Laws on Indonesia Political Parties, Elections, and Legislative Bodies: An Analysis", in R. William Liddle (ed) *Crafting Indonesian Democracy*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Ibrahim, Anwar. 2010. "Pelaksanaan demokrasi di Indonesia". *Wartawarga Gunadarma* 3 April.
- Inglehart, R. dan Christian Welzel. 2005. *Modernization, Cultural Change and Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- Mayo, Henry B. 2000. *Democracy : Theory and Practice*.
- McQuail, Denis. 2005. *Mass Communication Theory (Fifth Edition)*. London: Sage Publications.
- Murdock, Graham. 1990. "Redrawing the Map of the Communications Industries: Concentration and Ownership in the Era of Privatization", in Marjorie Ferguson (ed) *Public Communication—The New Imperatives: Future Directions for Media Research*. London: Sage.
- Rahmiatie. 2007. "Peran dan Fungsi Radio Komunitas sebagai Eskalasi Demokratisasi Komunikasi pada Komunitas Pedesaan di Jawa Barat". *Disertasi pada Universitas Padjadjaran Bandung*.
- Schuck, P. 2010. *Kegagalan Penguasa Otokrasi: Teori Transisi dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sen, Amartya. 2000. *Otonomie für den Menschen*. Munich: Beck.
- Sen, Amartya. 2000. *Development As Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Subiakto, Henry. 2011. *Kontestasi Wacana Civil Society, Negara, dan Industri Penyiaran dalam Demokratisasi Sistem Penyiaran Pasca Orde Baru*. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.